**EFEKTIVITAS** **PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh

**Nur Izzah Devilia**

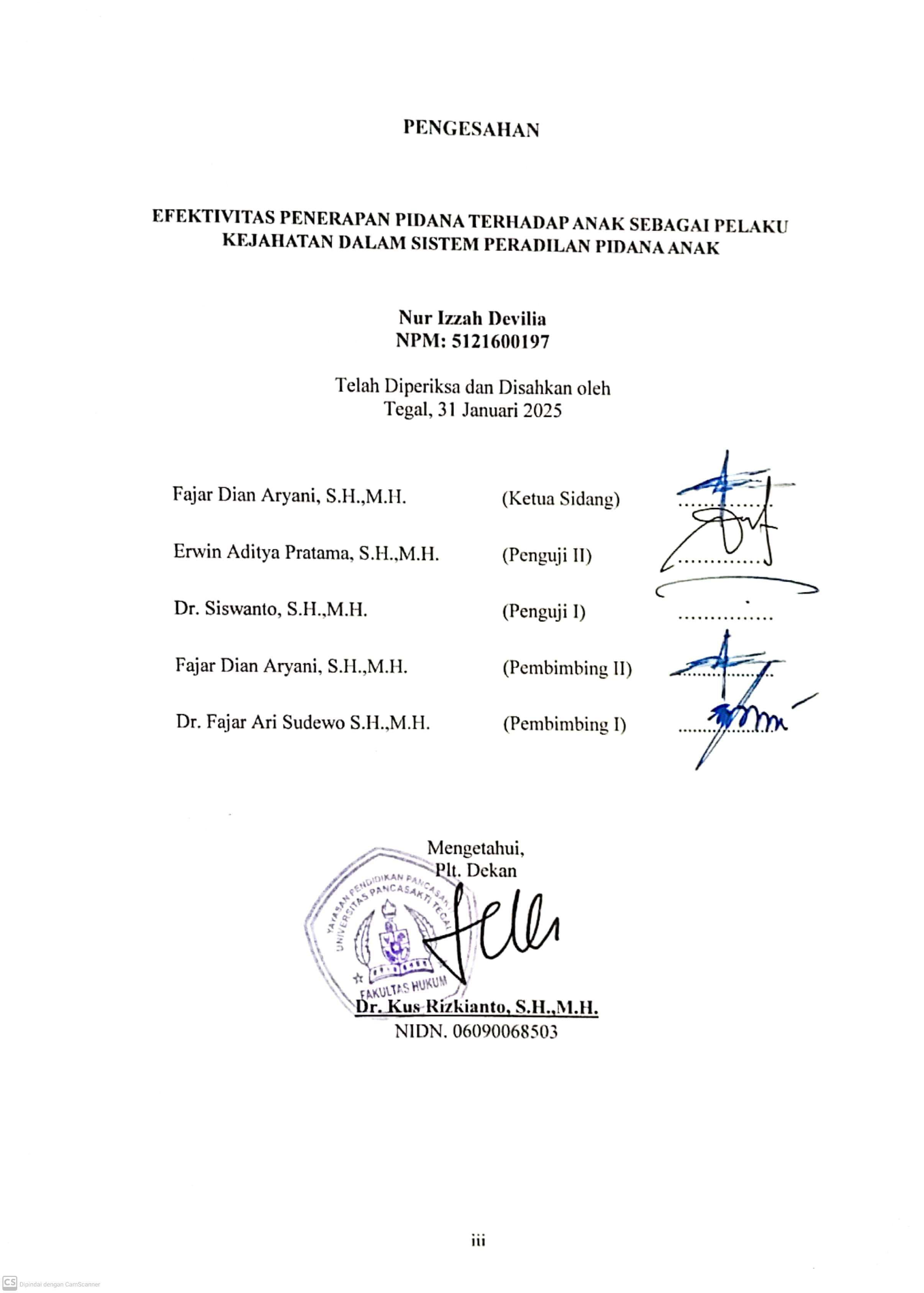
**5121600197**

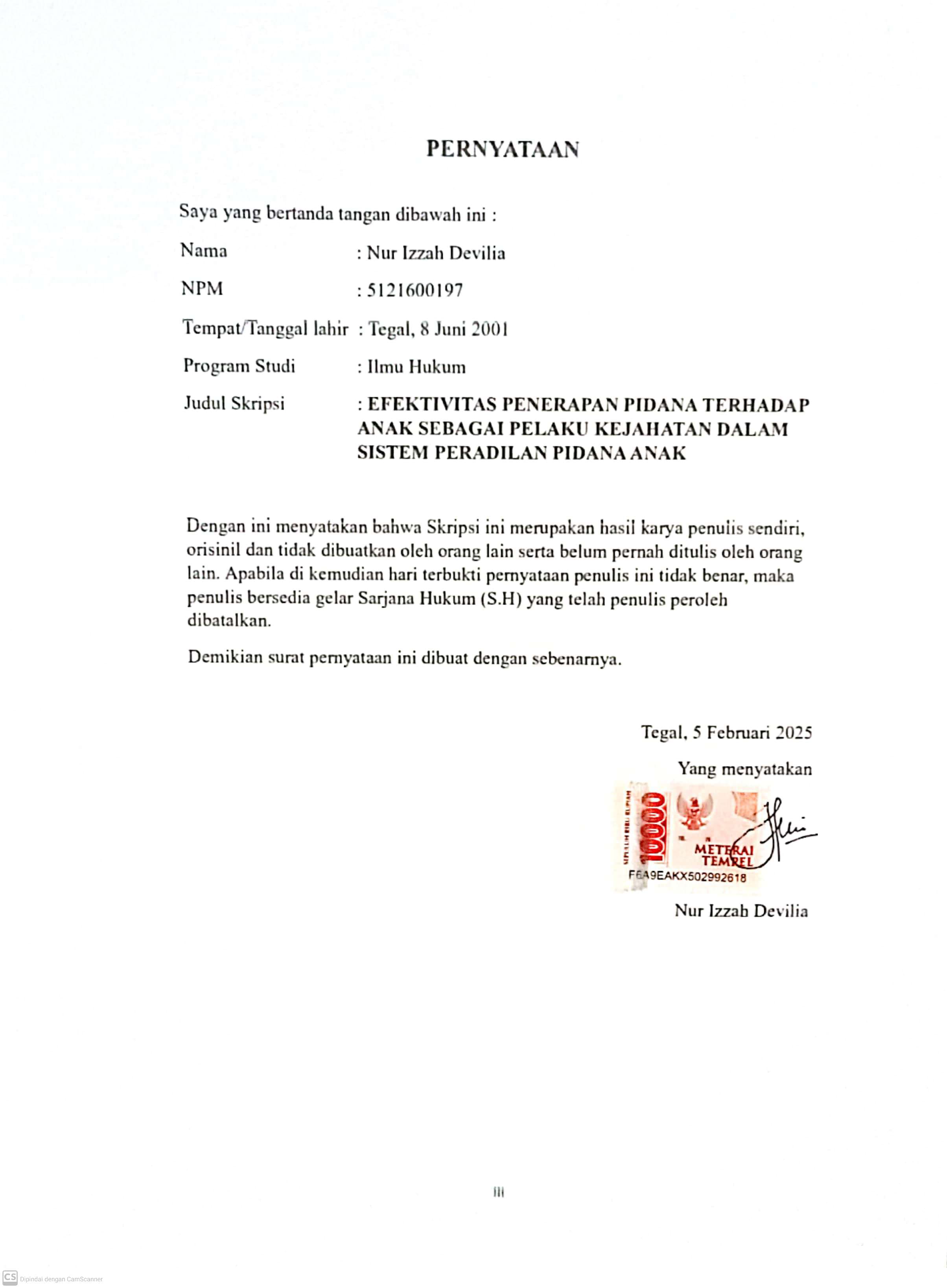
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**



****

****

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Izzah Devilia

NPM : 5121600197

Tempat/Tanggal lahir : Tegal, 8 Juni 2001

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 5 Februari 2025

Yang menyatakan

**ABSTRAK**

Anak-anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dimana mereka mimiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan penuh martabat sebagai manusia. Mereka adalah harapan dan sumber potensi yang akan meneruskan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk melindungi mereka dari segala perbuatan yang merugikan, serta berusaha sebaik mungkin agar mereka tidak menjadi korban atau pelaku kejahatan. Dilihat dari meningkatnya kasus keterlibatan anak dalam kegiatan kriminal telah menimbulkan kekhawatiran, sehingga memerlukan analisis komprehensif mengenai kerangka hukum dam implikasinya bagi anak yang melanggar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas ketentuan hukum pidana yang diterapkan pada anak serta implementasi sanksi pidana bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hal ini menyoroti tujuan keadilan bagi pelaku melalui rehabilitas. Penelitian ini juga menekankan pentingnya paradigma keadilan restoratif yang tujuannya memberikan keadilan kepada pelaku tindak pidana melalui rehabilitasi dan mempertimbangkan tahap perkembangan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan mengacu pada literatur. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka serta wawancara.

Hasil penelitian ini mengarah pada ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa anak di bawah usia 14 tahun hanya dapat dikenakan sanksi hukum. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas bentuk-bentuk pidana yang diberlakukan di Kepolisian Resort Tegal yang selama ini mengupayakan Diversi dalam berinteraksi dengan anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum.

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan yang berharga bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, serta semua pihak yang memerlukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

**Kata kunci : keadilan anak, diversi, rehabilitasi, UUSPPA**

***ABSTRACT***

*Children are a gift from God Almighty, where they have the right to be respected and treated with full dignity as human beings. They are the hope and source of potential that will continue the nation's ideals. Therefore, it is very important for us to protect them from all detrimental actions, and to try our best so that they do not become victims or perpetrators of crimes. Judging from the increasing cases of children's involvement in criminal activities, it has raised concerns, thus requiring a comprehensive analysis of the legal framework and its implications for children who violate.*

*This study aims to evaluate the effectiveness of criminal law provisions applied to children and the implementation of criminal sanctions for children involved in criminal acts, as part of the juvenile criminal justice system in Indonesia. This highlights the goal of justice for perpetrators through rehabilitation. This study also emphasizes the importance of the restorative justice paradigm which emphasizes the goal of providing justice to perpetrators of criminal acts through rehabilitation and considering the child's developmental stage. The research method used is a normative approach with reference to the literature. Data collection was carried out through literature reviews and interviews.*

*The results of this study lead to legal provisions based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which states that children under the age of 14 can only be subject to legal sanctions. This study also evaluates the effectiveness of the forms of criminal sanctions imposed by the Tegal Resort Police which have so far attempted Diversion in interacting with children involved in legal problems.*

*Based on the findings of this study, it is expected to provide valuable information and insight for students, academics, practitioners, and all parties who need it in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.*

***Keywords: juvenile justice, diversion, rehabilitation, UUSPPA***

**MOTTO**

“Berhentilah berfikir berlebihan, sepotong besi rusak karena karatnya sendiri, jangan biarkan dirimu rusak karena pikiranmu sendiri. Tidak usah terlalu cemas, karena cerita hidupmu sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik”

“*Jika nasi sudah menjadi bubur, maka buatlah bubur yang enak. Fokuslah pada tujuan dan solusi, bukannnya menyesali dengan apa yang sudah terjadi*”

Gus Baha

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu saya, selaku orangtua penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan do’a baik moral maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata 1 dalam ilmu hukum.
2. Kakek dan Nenek saya yang telah menjadi pilar kekuatan dan cahaya penuntun dalam setiap langkah perjalanan hidup saya. Tanpa pengorbanan, dan doa-doa tulus mereka, saya tidak akan pernah mampu menghadapi berbagai rintangan yang menguji ketahanan dan semangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Mereka adalah sumber inspirasi yang tak ternilai.
3. Bapak Dr. H. Fajar Ari Sudewo S.H.,M.H, dan Ibu Fajar Dian Aryani S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing 1 & 2 yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, dukungan, dan motivasi serta dengan sabar memberikan pendampingan, dan pengetahuan untuk penelitian skripsi ini.
4. Kakak saya Rizki Widi serta kakak ipar saya Nia Mardiana serta adik saya Tasya, yang telah menjadi tempat keluh kesah saya, yang selalu menyemangati saya disaat merasa lelah dan putus asa.
5. Sahabat saya Srituti Setya Wanti dan Wulandari, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat terdekat saya, yang telah menjadi bintang penuntun di malam-malam gelap saya. Mereka adalah pendengar setia yang selalu siap menampung segala keluh kesah dan impian saya, serta penyemangat yang tak pernah lelah untuk mendorong saya melampaui batasan diri.
6. Teman terbaik saya Laila, Adelia, Mila, Ica dan Seilanopa yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan akademik ini. Dalam setiap diskusi yang penuh gairah, tawa yang menghibur, dan momen-momen berharga yang kami bagi, mereka telah mengajarkan saya arti persahabatan sejati. Ketika tantangan datang silih berganti, kehadiran mereka bagaikan oase di tengah padang pasir, memberikan harapan dan kekuatan untuk terus berjuang hingga titik akhir.
7. Teman seperjuangan saya, Dela AIC dan Cindy Fadela yang selama ini menjadi teman curhat dan teman keluh kesah yang blak-blakan dan selalu bisa membuat saya tertawa, bahkan di saat-saat paling menegangkan sekalipun. Terima kasih telah menjadi teman yang tidak hanya jujur, tetapi juga mampu mengingatkan saya bahwa hidup ini terlalu singkat untuk tidak tertawa, bahkan saat menghadapi skripsi yang menantang
8. Tetangga sekaligus Mbak yang mau membantu saya, Tri Dita H.L, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak yang selalu siap membantu dan menjadi sosok yang penuh kebaikan, beliau telah menjadi teman dan mentor yang tak ternilai. Baik itu saat saya membutuhkan saran dalam menyelesaikan tugas, atau sekadar berbagi cerita di teras rumah.
9. Teman SMA saya sekaligus teman nongki saya Ikhsan, Frendi, Fawaz, Mulyo, Danang, Gilang dan Mbuets alias Nia, Nanik S.W. terimakasih karena selama ini sudah menjadi teman yang selalu membawakan tawa disaat sedang bersama, selalu memberi pertolong disaat membutuhkan.
10. Teman Mts saya Noni Gandani & Afni Ami Azahro yang baik hati, imut, dan menggemaskan terimakasih karena selama ini selalu mensupport saya, selalu memberikan lelucon saat bersama, yang sedari dulu slalu baik dan mampu bertahan dalam menghadapi teman seperti saya.

**KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nnya serta kebaikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**”** sebagai kewajiban dan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di program studi ilmu hukum, Uiversitas Pancasakti Tegal.

Penyusun skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bimbingan beverapa pihak terkait mulai dari penyususnan, penelitian, hingga penyelesaiaan tahap akhir. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M. Hum. Selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto S.H.,M.H, selaku Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
3. Ibu Soesi Idayanti S.H.,M.H selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
4. Ibu Fajar Dian Aryani S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
5. Bapak Dr.H.Moh. Khamim,S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
6. Bapak Dr.H. Sanusi S.H.,M.H, selaku dosen Pembimbing Akademik
7. Bapak Dr. H. Fajar Ari Sudewo S.H.,M.H, dan Ibu Fajar Dian Aryani S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing 1 & 2 yang berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyususnan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Program studi Ilmu Hukum UPS tegal yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan melalui pembelajaran formal selama perkuliahan serta staf UPS tegal
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah
10. Kedua orangtua, kakak dan kakak ipar, dan adik saya yang selalu memberikan semangat afirmasi positif, dukungan materi, dan kekuatan hati
11. Rekan sekaligus teman seperjuangan saya sahabat sekaligus keluarga yang selalu membersamai dan menjadi garda terdepan, memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 5 Februari 2025

Nur Izzah Devilia

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Nur Izzah Devilia

NPM : 5121600197

Tempat/ Tanggal Lahir : Tegal, 8 Juni 2001

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Ds. Tonggara RT 02 RW 01 Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal

Riwayat Pendidikan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Sekolah** | **Tahun Masuk** | **Tahun Lulus** |
| 1 | SD NEGERI TONGGARA 01 | 2007 | 2013 |
| 2 | MTS NEGERI 2 TEGAL | 2013 | 2016 |
| 3 | SMA NEGERI 1 PANGKAH | 2016 | 2019 |
| 4 | S1 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL | 2021 | 2025 |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 5 Februari 2025

Hormat saya,

Nur Izzah Devilia

**DAFTAR ISI**

**Cover i**

**Persetujuan ii**

[**Pernyataan iii**](#_Toc188363697)

[**Abstrak vi**](#_Toc188363698)

[***Abstract* vii**](#_Toc188363699)

[**Motto viii**](#_Toc188363700)

[**Persembahan ix**](#_Toc188363701)

[**Kata Pengantar xi**](#_Toc188363702)

[**Daftar Riwayat Hidup xiii**](#_Toc188363703)

[**Daftar Isi xii**](#_Toc188363704)

[**BAB I 1**](#_Toc188363705)

[**Pendahuluan 1**](#_Toc188363706)

1. [Latar Belakang Masalah 1](#_Toc188363707)
2. [Rumusan Masalah 8](#_Toc188363708)
3. [Tujuan Penelitian 9](#_Toc188363709)
4. [Urgensi Penelitian 9](#_Toc188363710)
5. [Tinjauan Pustaka 10](#_Toc188363711)
6. [Metode Penelitian 13](#_Toc188363712)
7. [Sistematika Penulisan 16](#_Toc188363713)

[**BAB II 18**](#_Toc188363714)

[**Tinjauan Konseptual 18**](#_Toc188363715)

1. [Tinjauan Umum Tentang Pidana,Tindak Pidana Dan Pemidanaan 18](#_Toc188363716)

[1. Pengertian Pidana 18](#_Toc188363717)

[2. Pengertian Tindak Pidana 19](#_Toc188363718)

[3. Pengertian Pemidanaan 21](#_Toc188363719)

[4. Tujuan Pemidanaan 27](#_Toc188363720)

1. [Ketentuan Sanksi Pidana 30](#_Toc188363721)
2. Pengertian Sanksi Pidana 30
3. Jenis Sanksi Pidana 31
4. Ketentuan Sanksi Pidana 35
5. Penerapana Sanksi Pidana 36

[C.Tinjauan Umum Tentang Anak 41](#_Toc188363722)

1. [Pengertian Anak 41](#_Toc188363723)

[2. Anak Menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak 44](#_Toc188363724)

[3. Definisi Anak Menurut Uu Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 48](#_Toc188363725)

4. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 49

[D.Sistem Peradilan Pidana Anak 51](#_Toc188363726)

1. [Pengertian Sppa 51](#_Toc188363727)
2. [Tujuan Spppa 53](#_Toc188363728)
3. [Asas Dan Prinsip Sppa 55](#_Toc188363729)
4. [Karakteristik Sppa 60](#_Toc188363730)

[**BAB III 62**](#_Toc188363731)

[**Hasil Penelitian Dan Pembahasan 62**](#_Toc188363732)

1. [Pengaturan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahtan Di Indoensia 62](#_Toc188363733)

[B. Bentuk Pidana Yang Efektif Di Terapkan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan 79](#_Toc188363734)

[**BAB IV 93**](#_Toc188363735)

[**Penutup 93**](#_Toc188363736)

[A.Kesimpulan 93](#_Toc188363737)

[B.Saran 94](#_Toc188363738)

[**Daftar Pustaka 95**](#_Toc188363739)

**Lampiran 103**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Beberapa tahun terakhir ini, anak dibawah umur terlibat masalah kejahatan hal ini telah membuat perhatian serius diberbagai belahan dunia, termasuk yang terjadi di Indonesia. Menambahnya angka pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak menunjukkan kekhawatiran yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak, yang utamanya adalah dalam perlindungan anak dan penegakkan hukumnya. Banyaknya peristiwa yang terjadi dan diberitakan di media sosial bahwa sebagian besar pelaku tindak pidana adalah anak. Anak merupakan sosok yang dapat dikatakan belum memahami apa yang baik atau buruk dalam mengambil tindakan. Kejahatan yang dilakukan oleh anak berawal dari perilaku yang menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, yang kemudian berujung pada tindakan kriminal atau biasa disebut *Juvenil Deliquency*[[1]](#footnote-1)*.*

Anak secara garis besar mempunyai makna yang artinya seseorang yang belum mencapai tahapan dewasa secara fisik dan mental, yang mana setidaknya belum mencapai masa pubertas. Anak masuk dalam kategori pada usia-usia bayi hingga sekolah dasar bahkan sampai usia remaja tergantung

dalam penggolongannya. Dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, terutama yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

yang mana disebutkan seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Anak, 1997). Penggolongan ini terutama penting dalam proses hukum yang ada di Indonesia, yang mana seorang yang berbuat kriminal dikategorikan sebagai anak akan diadili dalam pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan anak.[[2]](#footnote-2)

Anak-anak merupakan unsur penting dalam negara, sehingga untuk melindungi mereka dari kejahatan yang dilakukan oleh anak, konstitusi indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dengan berbagai pertimbangan :

1. Anak-anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
2. Untuk menjaga martabat tersebut, anak-anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama dalam hal perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
3. Sebagai Negara Pihak Konvensi Hak Anak, Indonesia juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum khusus kepada anak-anak yang terjerat masalah hukum, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam konvensi tersebut;
4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak lagi sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat saat ini, karena belum memberikan perlindungan yang komprehensif bagi anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Oleh karena itu, perlu ada penggantian dengan undang-undang yang lebih baru dan lebih relevan;
5. Berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan pada huruf a, b, c, dan huruf d, maka perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak.[[3]](#footnote-3)

Peradilan pidana anak adalah salah satu bentuk upaya untuk menjamin kesejahteraan anak yang mana kasus anak diadili secara tersendiri. Segala kegiatan di bidang hukum pidana anak dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, atau petugas lembaga pemasyarakatan anak, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim bertugas untuk menjatuhkan hukuman atau tindakan bertujuan memeberikan manfaat optimal bagi anak, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan penegakan hukum. Sanksi yang dikenakan seharusnya berlandaskan pada prinsip kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak, serta memeberikan akuntabilitas bagi masa depan mereka. Penanganan yang kurang tepat dapat menimbulkan dampak negatif dan merugikan perkembangan bangsa di masa yang akan datang, mengingat anak-anak adalah generasi penerus yang sangat menentukan arah bangsa[[4]](#footnote-4).

Sistem peradilan anak di Indonesia dirancang untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang terlibat dalam proses hukum. Hal ini terlihat jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menetapkan prosedur hukum yang berbeda dari sistem peradilan yang umum. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak pelaku kejahatan, bukan untuk menghukum mereka dengan cara yang keras. Dalam Undang-Undang tersebut, ditekankan bahwa sistem peradilan pidana anak didasarkan pada prinsip perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, sistem ini memberikan ruang untuk menghargai pendapat anak,memperhatikan kelangsunngan hidup dan perkembangan mereka, serta menyediakan pembinaan dan pendampingan. Prinsip proporsionalitas juga diutamakan, di mana penahanan dan hukuman pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir dan pembalasan harus dihindari. Selanjutnya, Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa anak hanya boleh dijatuhi hukuman atau dianggap melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.[[5]](#footnote-5)

Sistem peradilan pidana mencakup anak-anak yang tidak hanya terlibat, tetapi juga memiliki karakteristik unik yang perlu diperhatikan. Dalam konteks kekhususuan tersebut, penanganan anak yang terlibat dalam permasalahan hukum harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang mencakup aspek fisik psikologis, dan sosial yang pada setiap anak berbeda satu sama lain. Secara teoritis, tujuan sistem peradilan pidana anak dapat berbeda dengan satu negara dengan negara lainnya, sejalan dengan paradigma yang dianut di masing-masing negara. Terddapat tiga paradigma yang relevan dengan peradilan anak, yaitu pembinaan indiviual, *retributive* dan *restorative.*[[6]](#footnote-6)Penjelasann dari 3 paradigma tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Paradigma pembinaan individual

Dalam paradigma ini, peradilan anak yang berfokus terutama pada

permasalahan pelaku, bukan pada tindakan yang mereka lakukan atau

kerugian yang mungkin timbul. Dalam konteks ini, penerapan sanksi dianggap tidak relevan, tidak penting, dan umumnya tidak cocok. Keberhasilan sanksi dapat diukur melalui kebutuhan untuk mengidentifikasi pelaku.dengan demikian, fokus utamanya adalah pada identifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif dalam menyelesaikan masalah. Dari sudut pandang sistem peradilan anak yang menganutparadigma pembangunan individu, aspek perlindungan tidak langsung menjadi bagian dari fungsi pengadilan anak.

1. Paradigma retributif

Didalam paradigma ini, sistem peradilan pidana anak dapat menjatuhkan sanksi yang efektif jika dilihat dari realitas apakah pelaku telah menerima hukuman yang sesuai, pasti, tepat, dan adil. Bentuk hukuman dapat berupa kurungan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, atau moneter. Untuk mencapai perlindungan masyarakat yang optimal, pengawasan menjadi strategi yang paling efektif. Penilaian keberhasilan dlam perlindungan masyarakat dapat diukur melalui kondisi tertentu, yakni apakah pelaku perlu ditahan atau apakah tindakan pencegahan lainnya yang lebih diperlukan.

1. Paradigma restoratif

Menurut paradigma ini, sistem peradilan pidana bagi anak berfokus pada pencapaian tujuan penjatuhan sanksi dengan melibatkan korban secara aktif. Korban memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan. Keberhasilan tujuan sanksi dapat diukur dengan memperhatikan berbagai indikator, seperti seberapa jauh korban telah dipulihkan, tingkat kepuasan mereka, besarnya ganti rugi yang diterima, kesadaran pelaku terhadap tindakannya, jumlah perjanjian perbaikan yang dibuat, dan kualitas pelayanan yang diberikan, serta keseluruhan proses yang berlangsung. Sanksi yang diterapkan dapt berupa restitusi, meddiasi antara korban dan pelaku, layanan untuk korban, pemulihan kondisi masyarakat, serta pembayaran denda restoratif yang bertujuan memenuhi biaya pemulihan. Dalam paradigma ini, kehadiran peradilan pidana anak bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan tetap menegakkan keadilan.

Sanksi merupakan konsekuensi yang wajar atas tindakan yang dilakukan. Setiap subjek hukum yang terlibat dalam tindak pidana dapat dituntut, termasuk anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum yang juga dapat dikenakan sanksi. Undang-Undang No. 1o tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur jenis-jenis sanksi, yang terdiri dari sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagaimana dijelaskan dalam Bab V UU tersebut. Berdasarkan pasal 69 ayat (2) dari UU No. 11 Tahun 2012, anak yang berusia di bawah 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Tingkat keparahan tindakan keadilan anal, kondisi saat perbuatan dilakukan, serta dampak yang terjadi kemudian bisa menjadi pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman. Ini dilakukan dengan memperhatikan kepentingan keadilan dan kemanusiaanlk.[[7]](#footnote-7)

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku di bawah umur sering kali menjadi perdebatan. Di satu sisi, masyarakat menginginkan keadilan dan perlindungan terhadap korban, sementara di sisi lain, ada kebutuhan untuk memahami bahwa anak-anak masih dalam proses perkembangan dan seharusnya mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Sanksi yang diberikan kepada anak sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, namun belum cukup efektif penerapannya karena setelah pemberian putusan sanksi pidana penajara oleh hakim berefek terhadap kepribadian seorang anak yang khususunya pada mental anak yang dapat terganggu ketika anak tersebut kembali ke masyarakat setelah menjalani tahanan.[[8]](#footnote-8)

Menurut data dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah anak di Indonesia yang terlibat dalam kasus kriminalitas meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem sanksi yang ada untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya dapat menegakkan hukum, tetapi juga mendukung perkembangan positif anak.

Hal ini menjadi suatu masalah yang menarik untuk dikaji oleh penulis. Oleh sebab itu penulis ingin melakukan kajian mendalam tentang Efektivitas Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan dalam hukum pidana di indonesia?
2. Bagaimana bentuk pidana yang efektif di terapkan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan?
3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pembahasan diatas adalah :

1. Menganalisis penerapan sanksi pidana pelaku di bawah umur sebagai pelaku kejahatan dan menganalisis jenis bentuk pemidanaan untuk anak pelaku kejahatan
2. Untuk mengevaluasi sejauh mana kerangka hukum, apakah sudah efektif dalam menangani proses pelaku tindak pidana dibawah umur.
3. **Urgensi Penelitian**

Urgensi penelitian mengenai analisis efektivitas sanksi terhadap pelaku remaja adalah bahwa jumlah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku remaja mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan angka kejahatan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Melihat fenomena tersebut, memberi kesan bahwa sanksi terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur masih belum efektif dan tidak memberikan efek jera, dan bisa saja pelaku melakukan kejahatan yang sama lagi. Kurangnya sanksi hukum dan sosial terhadap pelaku remaja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya angka kejahatan di kalangan remaja. Secara hukum, berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2012, pelaku remaja dapat dikembalikan kepada orang tua/walinya dan dipidana selama 3 tahun di fasilitas LPSK dengan imbalan atau penyelesaian dengan imbalan bentuk pelatihan bulanan. Penjahat berlangsung seumur hidup, dan kecil kemungkinannya akan terjadi perubahan signifikan dalam masyarakat setelah melakukan kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi sosial terhadap pelanggar kecil masih berdampak kecil terhadap pelakunya.

1. **Tinjauan Pustaka**

Sejauh pengetahuan peneliti mengkaji karya-karya ilmiah, beberapa karya yang mirip menurut dengan penilitian ini. Namun, dalam melakukan kajian pustaka, peneliti menemukan 3 tema karya ilmiah yang berhubungan erat dengan tema penelitian terdahulu, yaitu :

1. Afif Falady Al Rasyid mahasiswa Universitas Sebelas Maret melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2021/PN SKT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara pada putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt menggunakan dakwaan tunggal, dan tetap memberikan putusan pemidanaan karena hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana persetubuhan diawali dengan bujuk rayu kepada korban. Pertimbangan yang diambil hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 183 KUHAP, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan juga Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengingat Anak di bawah umur tidak boleh mendapatkan pidana penjara seperti halnya orang dewasa sehingga ia bisa melanjutkan keberlangsungan hidupnya dengan menjadi individu yang lebih baik.
2. Muhammad Nur Fajri Mustami mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar yang melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Residivis Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Makassar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana pencurian secara berulang belum mengetahui perbuatannya tersebut melanggar aturan, dikarenakan tidak mendapat pembinaan yang maksimal setelah anak tersebut melakukan tindak pidana, dan adanya pengaruh pergaulan terhadap psikologis anak untuk kembali melakukan tindak pidana yang dilakukan, sehingga anak terdorong untuk melakukan lagi tindakan tersebut. Disini peran psikologi pada lembaga pembinaan khusus anak belum maksimal.
3. Dyva Rahmalia Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah melakukan penelitian yang berjudul “Proses Pidana Terhadap Pealku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2021/PN Skh). Hasil penelitian memaparkan bahwasannya pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2021/PNSkh, berupa dakwaan primair Pasal 81 (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Berdasarkan pertimbangan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti yang diajukan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak. Serta, hakim dalam menjatuhkan putusna anak terbukti bersalah melangar pasal 81 (1) jo pasal 76 D sehingga di pidana tindakan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial YPAN (Yayasan Pendidikan Anak Nakal) sehingga dalam putusan tersebut hakim tidak mengidahkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tidak melakukan upaya diversi dalam pengadilan. Dalam UUSPPA yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum diwajibkan untuk mengupayakan diversi terlebih dahulu. Merujuk pada Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang menyatakan, “hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjaara 7 (tujuh) tahun atau lebih menggunakan bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun gabungan”. Oleh karena itu, dengan ketentuan diversi yang telah diatur dalam sistem peradilan pidana anak wajib dilakukan upaya diversi hingga tingkat peradilan.

Dari beberapa penelitian diatas ada beberapa hal yang memiliki kesamaan dalam penelitian yang akan dibahas antara lain yaitu dengan permasalahan penjatuhan sanksi kepada anak sebagai pelaku kejahatan. Penelitian yang dilakukan Afif Falady Al Rasyid mahasiswa Universitas Sebelas Maret berfokus pada putusan hakim yang tidak melakukan diversi namun tetap memvonis anak sebagai pelaku kejahatan. Namun, kini penulis akan melakukan kajian baru yaitu dengan meniliti bentuk pemidanaan yang efektif dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku kejahatan dan penerapannya.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Nur Fajri Mustami mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar berfokus pada faktor intelegensi, faktor lingkungan sosial terhadap psikologis anak dan peran psikologis pada LPKA dalam membina anak sebagai residivis tindak pencurian. Peneliti baru akan berfokus pada bentuk pemidanaan yang efektif sehingga anak tidak melakukan kembali kejahatan.

Dyva Rahmalia Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berfokus pada pengaturan tentang adanya diversi melalui pendekatan sestice dalam sistem peradilan pidana dan pertimbangan bagi hakim yang tidak menggunakan diversi. Oleh karena itu, penelitian yang ditulis oleh penulis memliiki kebaruan yang berfokus pada bentuk - bentuk pemidanaan yang efektif pada anak sebagai pelaku kejahatan.

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode penelitian hukum yuridis normatif dan lapangan dengan wawancara langsung dengan narasumber. Sumber data ini menggunakan data sekunder yaitu mengambil data terkait jumlah pelaku kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dibawah umur dan menggunakan literatur yang berkaitan denga topik penelitian seperti buku, jurnal, artikel dan lain-lain serta peraturan hukum yang terkait.

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu bertujuan untuk memahami fenomena sosial dengan cara pengumpulan data non-numerik. Pendekatan ini fokus pada makna, pengalaman, perspektif individu, sehingga peneliti tertarik untuk menggali informasi secara dalam tentang perilaku pelaku kejahatan di bawah umur.

1. Data penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan berasal dari beberapa sumber. Berikut adalah beberapa jenis yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini, yaitu :

1. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini, data sekunder ini mencakup artikel atau jurnal ilmiah, penelitian, pendapat para ahli dan masalah hukum.

1. Data primer

Data primer adalah bahan hukum yang bersifat autoriatif yang memiliki makna otoritas (Peter Mahmud Muzaki, 2005). Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer anatara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Konvensi Hak Anak
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
4. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
6. UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
7. UU No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
8. Data tersier

Data tersier merupakan penjelasan yang terpacu dalam data primer dan sekunder, seperti ensikopedia dan kamus hukum hukum tentang pidana anak.

1. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dan Wawancara. Prosedur yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu dengann membaca, mempelajari, mengutip, wawancara serta menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal- jurnal hukum serta literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu terkait sanksi pelaku dibawah umur.

1. Metode analisis data

Metode analisis data ini menggunakan analisis kualitatif. Tujuan dari analisis kualitatif yaitu dengan pengujian sebuah teori, memberikan fakta, untuk menunjukan adanya hubungan antar variable, pengembangan konsep dan pemahaman data yang dapat dilakukan setelah semua data terkumpul di tahap akhir. [[9]](#footnote-9)

1. **Sistematika Penulisan**

Dalam rencana laporan proposal ini penulis menyusun dalam bab yang masing-masing berkaitan. Beberapa bab tersebut sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, terdiri dari beberapa sub bab yaitu : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika laporan. Isi di dalam Bab I digunakan untuk pedoman bagi tinjauan pustaka yang ada di Bab II yang mana akan menjadi bahan analisis untuk menganalisis hasil penelitian Bab III dan untuk menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian.

BAB II Tinjauan Konseptual, berisi tentang kajian pustaka atau penelusuran literatur yang membahas beberapa pengertian umum dari definisi anak, hak-hak anak, dan penyebab anak melakukan tindak kejahatan. Dalam bab ini juga akan membahas mengenai pengertian dan pengaturan sistem peradilan pidana anak, prinsip - prinsip dalam sistem peradilan anak, diversi dalam UUSPPA, anak yang berhadapan dengan hukum, sanksi untuk anak yang melakukan kejahatan, serta efektivitas sanksi yang diberikan kepada anak.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini membahas tentang inti dari penelitian Efektivitas Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana.

BAB IV Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.

**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Umum Tentang Pidana,Tindak Pidana dan Pemidanaan**
2. Pengertian Pidana

Penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada seseorang yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut pidana. *Straf* berasal dari bahasa Belanda “pidana”, dan pada hakikatnya dapat diartikan sebagai penderita (nestapa) yang sengaja ditimpakan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah *straf* berasal dari istilah konvensional “hukuman”, tetapi Moeljatno menggunakan istilah inkonvensional, “pidana”. Dalam bidang hukum pidana, istilah “pidana” memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk memahami arti dan maknanya. Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana merupakan tanggapan atas pelanggaran, dan merupakan bentuk penderitaan yang dimaksudkan negara diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Adami chazawi mengatakan bahwa pidana adalah penderitaan yang senngaja diberikan atau dijatuhkan oleh seseorang. Menurut Sudarto pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.[[10]](#footnote-10) Menurut profesor van Hamel, pengertian

pidana atau hukuman berdaasarkan hukum positif saat ini adalah sebagai berikut :“penderitaan yang bersifat khusus yang ditimpakan oleh penguasa yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama Negara, yang bertanggungjawab atas ketertiban hukum umum “ mengacu pada pelaku tindak pidana, yaitu orang yang melanggar ketentuan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.[[11]](#footnote-11)

1. Pengertian Tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari terminologi hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Istilah ini juga muncul dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai apa maksud dari strafbaarfeit itu. Oleh karena itu, para ahli hukum mencoba menjelaskan arti dan isi istilah tersebut. Sayangnya, belum ada konsensus mengneai hal ini[[12]](#footnote-12).

Tindak pidana sering kali disamakan dengan delik, yang berasal dari kata latin *delictum.* Delik tercantum dalam KBBI,hal tersebut dijelaskan sebagai: “Delik adalah perbuatan yang dapat dihukum karena merupakan pelanggaran hukum pidana”.[[13]](#footnote-13)

Beberapa perspektif pakar antara lain :

1. Menurut Simons “ tindak pidana adalah kelakuan (*handeling)* yang dapat dihukum sebagai kejahatan, yang bertentangan dengan hukum, terkait dengan kesalahan, dan dilakukan oleh individu yang bertanggungjawab”
2. Moeljatno mendefinisikan “Tindakan pidana (tindak padana-pen) adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dengan adanya ancaman (sanksi) tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut”. Pidana anak-anak (*Kinderrstraf*) adalah pidana bagi anak – anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.
3. Sementara itu, Van hamel menjelaskan bahwa “tindak pidana adalah perilaku seseorang yang didefinisikan dalam hukum, yang melanggar aturan, layak dihukum, dan dilakukan dengan unsur kesalahan”.
4. Menurut Barda Nawawi arief[[14]](#footnote-14), bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat sebjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memerhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pendapat teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya cenderung masih memasukkan kesalahan dalam definisi tindak pidana, sekalipun juga ada yang memisahkannya.

1. Pengertian Pemidanaan

Sudarto menjelaskan, kata *punishment* identik dengan konsep hukuman. Hukuman sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau penetapan hukuman (hak). Pemberlakuan undang-undang ini mempunyai implikasi yang luas tidak hanya dalam bidang hukum pidana tetapi juga dalam bidang hukum lainnya. Oleh karena itu, istilah ini perlu dipersempit maknanya. Dengan kata lain, pemidanaan dalam suatu perkara pidana seringkali disamakan dengan hukuman atau putusan atau keputusan hakim[[15]](#footnote-15).

Pemidanaan juga dapat dipahami sebagai perkembangan langkah-langkah yang terlibat dalam menentukan dan menjatuhkan sanksi dalam kerangka hukum pidana. Biasanya istilah “pidana” mengacu pada masalah hukum, sedangkan “pemidanaan” menunjukkkan konsekuensi yang dijatuhkan. Selain itu, L.H.C Hulsman mendefinsikan sistem hukuman sebagai badan undang-undang yang mengatur sanksi pidana ddan tindakan hukuman.[[16]](#footnote-16)

Setelah penantian yang panjang, KUHP baru-baru ini disahkan oleh UU Nomor 1 Tahun 2023. Setelah KUHP menggunakan warisan kolonial Belanda yang tidak lagi relevan dengan semangat kemerdekaan dan kemajuan, ini menjadi tonggak sejarah penting bagi Indonesia. Karena alasan filosofis, politis, sosiologis, dan praktis, pembaruan hukum pidana Indonesia menyempurnakan sistem pemidanaan yang melibatkan pembaruan hukum pidana formal, materil, dan pelaksanaan. Dianggap bahwa KUHP lama tidak lagi relevan dengan prinsip dan kemajuan masyarakat, serta kemajuan dalam teknologi dan ilmu pengetahuan [[17]](#footnote-17)

Berbeda dengan undang-undang konvensional yang hanya mengatur bagian tertentu dan tetap terikat pada sistem lama, KUHP baru bertujuan untuk mengatur ulang sistem hukum pidana nasional secara keseluruhan. Sangat penting untuk memahami dan membahas makna pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana, terutama KUHP baru karena makna ini terkait dengan falsafah pemidanaan yang mendasari penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana. KUHP baru juga menunjukkan pergeseran dari pemidanaan retributif ke pemidanaan yang lebih bermanfaat, menekankan manfaat daripada penagihan. Hal ini menghasilkan paradigma dan perspektif baru tentang pemidanaan yang memberikan keadilan yang proporsional bagi pelaku dan korban kejahatan. Hukuman pidana digunakan sebagai cara untuk menghentikan tindak pidana dan sebagai penyelesaian ketika tindak pidana terjadi.[[18]](#footnote-18)

Ketika pelaku memutuskan bersalah di pengadilan, hukum pidana memberikan sanksi berupa pidana kepada mereka, yang lebih keras dari sanksi lain dan biasanya bersifat negatif karena menyebabkan penderitaan. Tujuan dari sanksi pidana ini adalah untuk menjaga ketenteraman dan keamanan masyarakat dan mendorong perilaku yang lebih baik. Pidana biasanya dianggap sebagai sanksi terakhir[[19]](#footnote-19).

BAB III Pasal 51 KUHP yang baru diubah menyatakan tujuan pemidanaan, yaitu untuk :

1. mencegah tindak pidana dengan menegakkan hukum untuk perlindungan dan pengayoman masyarakat ;
2. memasyarakatkan terpidana dengan memberikan bimbingan dan pelatihan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. menyelesaikan konflik yang diakibatkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
4. menumbuhkan nilai-nilai moral.

Beberapa pakar berpendapat bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP terbaru ini telah menyimpang dari teori retributif, berdasarkan rumusan tujuan pemidanaan yang disebutkan secara jelas dalam pasal ini. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, tujuan pemidanaan dalam KUHP baru diubah menjadi pencegahan, rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, menciptakan rasa aman dan ketentraman, dan mendorong terpidana untuk menyesal [[20]](#footnote-20).

Pada umumnya, orang hanya mengetahui bahwa hanya ada tiga teori tentang tujuan pemidanaan: teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Namun seiring berjalannya waktu , muncul beberapa teori tujuan pemidanaan tambahan yang menarik perhatian para sarjana hukum. Berikut ini adalah teori ketiga tujuan pemidanaan yang paling umum dikenal oleh para sarjana hukum.[[21]](#footnote-21)

1. Teori Absolut

Para tokoh abad ke-17 seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl mendukung teori absolut atau teori pembalasan. Menurut teori absolut, pidana semata-mata berfungsi sebagai pencapaian atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku. seperti yang dinyatakan oleh Hugo Grotius, yang mengatakan bahwa penderitaan yang buruk disebabkan oleh perbuatan jahat, atau malum passionis (quod inglitur). Johannes Andenaes juga berpendapat bahwa pidana adalah cara untuk memenuhi keadilan, dan korban akan merasa adil jika pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Namun, Kant menganggap pidana sebagai tuntutan kesusilaan.

Perintah kesusilaan yang menjamin hukuman bagi pelaku kejahatan Hegel juga berpendapat bahwa hukuman adalah konsekuensi logis dari melakukan kejahatan. Immanuel Kant juga berpendapat bahwa ketidakadilan disebabkan oleh kejahatan, yang karenanya harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Herbart, di sisi lain, percaya bahwa melakukan kejahatan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengembalikan rasa puas masyarakat, pidana harus dijatuhkan.

Oleh karena itu, menurut Karl O. Christiansen, teori retributif atau teori keberhasilan memiliki beberapa ciri khusus, yaitu:

1. Tujuan pidana hanya untuk memberikan pembalasan kepada pelaku ;
2. Pembalasan adalah tujuan utama sebagai satu-satunya tujuan yang ingin dicapai;
3. Harus ada kesalahan yang dilakukan atau diperbuat;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke tujuan klasik, yaitu pencelaan murni, dan tidak bertujuan.[[22]](#footnote-22)
6. Teori Relatif

Dalam teori yang hampir sama, pidana dipandang sebagai cara untuk melindungi kepentingan masyarakat. Karl O. Christiansen adalah pendiri teori ini. Menurut teori relatif, pidana tidak hanya digunakan untuk membalas pelaku kejahatan, tetapi juga digunakan untuk tujuan yang menguntungkan. Teori ini juga dikenal sebagai teori tujuan. Tujuan utama pemidanaan adalah sebagai berikut:

* 1. Menjaga Perekonomian Masyarakat;
  2. memperbaiki kerugian yang diterima masyarakat akibat kejahatan ;
  3. memperbaiki si penjahat;
  4. Membinasakan si penjahat; dan Kemungkinan kejahatan.

Teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus merupakan bagian dari teori tujuan. Filsuf Jerman von Feurbach mengembangkan teori pencegahan umum dan teori legalitas yang ditemukan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut von Feurbach, hukuman pidana yang diterapkan terhadap perbuatan terlarang harus diatur dengan undang-undang guna mencegah timbulnya niat jahat orang lain. Teori pencegahan umum adalah gagasan bahwa penerapan sanksi pidana diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dengan tujuan menimbulkan rasa takut pada orang lain dan menghalangi mereka untuk tidak melakukan kejahatan[[23]](#footnote-23).

1. Teori Keseimbangan

Dalam bukunya “Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System”, Roeslan Saleh mengatakan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Pemidanaan harus mempertimbangkan bukan hanya kepentingan pembuat atau masyarakat, tetapi juga perasaan korban dan keluarganya.

Masyarakat, pelaku, dan korban adalah yang ketiga yang dipersalahkan dari sudut pandang keseimbangan. Pemidanaan yang hanya menekankan kepentingan masyarakat akan menghasilkan pemidanaan yang menempatkan pelaku sebagai objek; pemidanaan yang hanya mementingkan pelaku akan menghasilkan pemidanaan yang sangat individualistis, yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya; dan pemidanaan yang hanya mementingkan korban akan menghasilkan pemidanaan yang hanya menjangkau kepentingan yang terbatas, tanpa dapat mempertimbangkan kepentingan pelaku.Teori ini bermula dari keinginan untuk mempertimbangkan hak-hak korban atau keluarga korban tindak pidana dan mewujudkan keseimbangan keadilan antara pelaku dan korban. Sebaliknya, teori ketiga di atas hanya fokus pada pelaku dan masyarakat.

1. Tujuan Pemidanaan

Substansi keadilan restoratif dalam KUHP baru termasuk Pasal 51 yang menjelaskan tujuan pemidanaan. Pasal ini secara substansial menyatakan bahwa pemidanaan dimaksudkan untuk: menegakkan norma hukum dan mengayomi , mendidik karyawan menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, mencapai keseimbangan dan menciptakan rasa damai di masyarakat, dan menumbuhkan rasa bersalah dan menyesal bagi karyawan. Lebih lanjut, martabat manusia harus diperhatikan dalam pemidanaan, menurut Pasal 52 UU KUHP. Hal ini menegaskan bahwa tindakan yang tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan tidak boleh dilakukan atas nama pemidanaan[[24]](#footnote-24).

Tujuan dari pemidanaan anak, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, adalah untuk menjaga nilai-nilai hukum Indonesia. Hal ini menekankan perlunya kolaborasi aktif antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana. Dari perspektif hukum profetik, substansi restorative justice yang diakui dalam KUHP merupakan langkah positif untuk memperkuat sistem peradilan pidana yang berlandaskan pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Pasal 51 KUHP menyatakan bahwa tujuan pemidanaan berfokus pada upaya mendidik kembali pelaku, yang relevan dengan nilai ketuhanan sebagai dasar hukum profesi. Ini mencerminkan konsep taubatan nasuha, di mana sikap pengampunan Tuhan menjadi landasan bagi kemungkinan perubahan bagi individu yang berperilaku buruk.

Selain itu, dari perspektif kesejahteraan, Pasal 52 UU KUHP[[25]](#footnote-25) menegaskan bahwa pemidanaan tidak boleh mewujudkan martabat manusia sejati, karena martabat manusia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam perspektif hukum profetik[[26]](#footnote-26), martabat manusia sejatinya adalah *Maqashidusy Syari'ah*, atau tujuan diterapkannya syari'at atau hukum yang berasal dari Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga martabat manusia adalah perintah Tuhan, dan siapa pun yang mengabaikan martabat orang lain melebihi batas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa substansi restorative justice yang difasilitasi oleh KUHP sebenarnya memiliki hubungan dengan gagasan hukum profetik. Perspektif hukum profetik tentang dampak *restorative justice* setelah KUHP lama disahkan menjadi KUHP baru adalah bahwa substansi *restorative justice* sebenarnya telah difasilitasi dan tersebar luas dalam UU KUHP.

Pasal 51 KUHP berbicara tentang tujuan pemidanaan dan bagaimana mendidik kembali kompensasi dengan nilai ketuhanan dari perspektif profetik. Menurut perspektif ini, konsep “taubatan nasuha” diperlukan, dan sikap maha pengampun Tuhan menjadi dasar untuk mendorong orang yang berperilaku buruk sekalipun untuk berubah. Selain itu, Pasal 52 UU KUHP menyatakan bahwa pemidanaan tidak boleh memenuhi martabat manusia, yang berarti bahwa menjaga martabat manusia adalah perintah Tuhan, dan orang yang mengabaikan martabat sesama manusia adalah melampaui batas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa substansi restorative justice yang difasilitasi oleh UU KUHP sebenarnya memiliki hubungan dengan gagasan hukum profetik.[[27]](#footnote-27)

1. **Ketentuan Sanksi Pidana**
2. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana terdiri dari dua kata, yaitu ”sanksi” dan “pidana”. Sanksi dapat mencakup ancaman, pidana, dan tanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang jika pelanggaran tersebut dilakukan. Selain itu, sanksi juga dapat diartikan sebagai hasil dari tindakan atau reaksi terhadap hal lain yang dilakukan oleh individu atau kelompok sosial. Perbedaan utama antara sanksi ini dan pelanggaran hukum lainnya adalah sifat koersifnya, yang berasal dari pemerintah, serta kemampuannya untuk diterapkan dan dilaksanakan secara tegas.

Penggunaan sanksi pidana dalam penegakkan aturan yang ada merupakan tuntutan sosial yang wajar mengingat kepentingan hukum yang harus dililndungi. Fungsi hukum pidana tidak hanya sekedar untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai moral, tetapi telah bergeser ke arah pendekatan kemanfaatan *(utilitarian approach)* dan pada yang terakhir ini hukum pidana dan sanksi pidana dianggap merupakan salah satu dari sekian sarana yang oleh masyarakat dapat digunakan untuk melindungi diri dari dari perilaku yang membahayakan masyarakat tersebut. Kegunaan sanksi pidana dinilai dari sudut apakah dengan mengenakan sanksi pidana tersebut dapat diciptakan kondisi yang lebih baik. [[28]](#footnote-28)

Sanksi pidana dalam KUHP yang baru kini terbagi menjadi 3 kategori yaitu terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Andi Hamzah, dalam analisanya tentang sistem pidana ddan hukuman di Indonesia, menjelaskan bahwa istilah pidana berkaitan erat dengan hukum pidana. Secara sederhana, sanksi pidana dapat diartikan sebagai hukuman yang diberikan kepada individu yang melanggar hukum.

1. Jenis – Jenis Sanksi Pidana

Pasal 64 UU No.1 tahun 2023 mengatur bahwa dalam KUHP yang baru, sanksi pidana terdiri dari sanksi utama, sanksi tambahan, dan sanksi khusus yang dikenakan pada tindak pidana tertentu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yakni :[[29]](#footnote-29)

1. Pidana Pokok

Ketentuan pasal 65 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 menerangkan bahwa pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana penjara
2. Pidana tutupan
3. Pidana pengawasan
4. Pidana denda
5. Pidana kerja sosial

Bagian Penjelasan Pasal 65 (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan bahwa KUHP baru tidak terbatas pada pidana penjara dan denda. Adapun pidana mati, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial adalah pelaksanaan pidana alternatif. Selain itu, dengan penerapan pidana hukum yang mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku tindak pidana.

Diharapkan bhawa penegakkan hukum terhaddap jenis kejahatan ini dapat membebaskan terpidana dari perasaan bersalah, sekaligus memberi kesempatan bagi masyarakat untuk secara aktif berperan dalam proses reintegrasi narapidana melalui kegiatan positif, seperti kerja sosial. Dalam konteks tindak pidana poko, Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengindikasikan bahwa urutan tindak pidana akan memengaruhi berat atau ringan hukuman yang dijatuhkan. Sementara itu, bagian penjelasan Pasal 65 ayat 2 menyatakan bahwa hakim memiliki kebijakan untuk memilih salah satu tindak pidana alternatif yang sesuia dengan maksud dari hukuman tersebut. Apabila tujuan hukuman telah terpenuhi, maka penjatuhan hukuman dapat dilakukan dengan mengutamakan jenis hukuman yang lebih ringan.

1. Pidana tambahan

Ketentuan pasal 66 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 menerangkan bahwa pidana tambahan terdiri atas :[[30]](#footnote-30)

1. Pencabutan hak tertentu
2. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan
3. Pengumuman putusan hakim
4. Pembayarn ganti rugi
5. Pencabutan izin tertentu
6. Pemenuhan kewajiban adat setempat

Pidana tambahan dapat dikenakan jika penjatuhan pidana pokok tidak cukup untuk encapai tujuan pemidanaan. Penjatuhan pidana tambahan dapat dilakukan lebih dari satu jenis.

Ancaman hukuman paling tinggi bagi pelaku dewasa, yaitu pidana mati, yang diikuti oleh penjara seumur hidup dan hukuman penjara maksimal 20 tahun. Sementara itu, anak-anak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup; hukuman penjara maksimum yang dapat diterapkan terhadap mereka adalah 10 tahun, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (6) UU SPPA. Selain itu, dalam Pasal 81 ayat (2) UU SPPA menjelaskan bahwa hukuman maksimum bagi anak adalah setengah dari hukuman maksimum yang berrlaku bagi orang dewasa.[[31]](#footnote-31)

1. Pidana yang bersifat khusus

Ketentuan Pasal 67 UU 1/2023mengatur bahwa hukaman mati merupakan salah satu jenis pidana khusus yang harus selalu disertai dengan allternatif hukuman. Penjelasan dari pasal tersebut menyatakan bahwa tindak pidana yang dikenakan sanksi khusus adalah tindak pidana yang termasuk dalam kategori sangat serius atau luar biasa. Contoh tindak pidana yang dimaksud mencakup tindak pidana[[32]](#footnote-32) narkotika, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, serta pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

Selanjutnya, hukuman mati diperlukan sebagai jenis hukuman khusus yang ditempatkan dalam bagian terpisah, guna menegaskan bahwa hukuman ini memiliki keistimewaan tersendiri. Jika kita bandingkan dengan jenis hukuman lainnya, hukuman mati menempati posisi paling serius. Oleh karena itu, seharusnya selalu ada alternatif antara hukuman mati dengan jenis hukuman lain, seperti penjara seumur hidup atau hukuman penjara maksimal selama 20 tahun.

1. Penerapan Sanksi Pidana

Sanksi pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dalam tatanan sosial yang terganggu akibat pelanggaran aturan. G.P. Hoefnagels menyatakan bahwa sanksi pidana digunakan sebagai tindak balas terhadap pelanggaran hukum dalam kerangka hukum yang ditetapkan, mulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses temporal di mana seluruh peristiwa dianggap kriminal.[[33]](#footnote-33)

Sanksi pidana adalah salah satu metode paling efektif untuk memerangi kejahatan namun jika diperlukan, upaya sossial harrus digunakan secara bersamaan dengan sanksi pidana. Oleh karena itu, prinsip multimium remedium bukan premium remedium harus dikembangkan berdasarkan prinsip multimium. Dengan demikian, sanksi pidana dapat dianggap sebagai alat yang digunakan untuk memerangi kejahatan atau bahaya besar dan sekaligus menangani ancaman.

Menurut Sudarto, esensi dari sanksi pidana memiliki beberapa unsur atau karakteristik sebagai berikut: [[34]](#footnote-34)

1. Hukuman pada dasarnya merupakan suatu bentuk pemaksaan yang mengakibatkan penderitaan atau konsekuensi tidak menyenangkan lainnya;
2. Hukuman tersebut diterapkan secara sengaja oleh individu atau lembaga yang memiliki wewenang (otoritas);
3. Hukum Pidana diberlakukan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan pengertian dan unsur-unsur sanksi dan pidana diatas dapat dirumuskan bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah tindakan yang disengaja dilakukan oleh badan yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan yang menimbulkan penderitaan, kesengsaraan, atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran tindak pidana berdasarkan undang-undang atau prosedur hukum. Salah satu ciri yang membedakan hukum piana dari jenis hukum yang lain adalah ancaman pidana yang diberikan kepada pembuat delik, Soejono menjalskan bahwa hukuman adalah sanksi yang dijatuhkan apabila seseorang melakukan pelanggaran hukum. KUHP memberikan perincian lebih lanjut tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggar hukum pidana. Pada dasarnya, karena hukum pidana memiliki sanksi yang negatif, banyak orang percaya bajwa pidana harud diterapkan jika upaya lain sudah dilakukan.[[35]](#footnote-35)

1. Ketentuan Sanksi untuk Anak

Sanksi merupakan akibat yang wajar dari setiap tindakan yang diambil. Setiap individu yang melakukan tindak pidana, baik yang dihadapkan dengan sanksi pidana maupun sanksi tindakan, dianggap sebagai subjek hukum yang berhak dikenakan sanksi sesuai dengan situasi yang ada. Bahkan, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana juga bisa dikenakan hukuman atau tindakan tertentu. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun. Selain itu, mereka yang berusia 12 tahun ke atas tetapi belum mencapai 18 tahun juga dapat diadili dalam sistem peradilan pidana.jika seorang anak terbukti bersalah melakukakn tindak pidana, mereka dapat dikenakan sanksi, baik "pidana" atau "tindakan", sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 69 Ayat (1). Selain itu, Pasal 69 Ayat (2) menetapkan bahwa anak yang berusia di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.[[36]](#footnote-36)

Penting untuk dicatat bahwa dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh anak, beberapa faktor seperti tingkat keparahan pelanggaran, situasi pribadi anak, serta kondisi saat pelanggaran terjadi dan konsekuensi setelahnya, dapat mempengaruhi keputusan hakim. Hakim memiliki pertimbangan untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana atau mengambil langkah-langkah lainnya dengan berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan. Sesuai dengan pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak diatur sebagai berikut [[37]](#footnote-37) :

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

a. Peringatan;

b. Pidana dengan syarat:

1) Pembinaan di luar lembaga;

2) Pelayanan masyarakat; atau

3) Pengawasan.

c. Pelatihan kerja;

d. Pembinaan dalam lembaga; dan

e. Penjara.

2. Pidana tambahan meliputi :

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

b. Pemenuhan kewajiban adat.

3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara denda, maka denda tersebut dapat diganti dengan pelatihan kerja.

4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabak anak.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur di dalam Peraturan Pemerintah

Dalam konteks hukuman kumulatif seperti penjara dan denda ditetapkan berdasarkan hukum materiil [[38]](#footnote-38), maka denda dapat digantikan dengan pelatihan kerja. Penting untuk memastikan bahwa setiap hukuman yang dijatuhkan kepada seorang anak tidak merendahkan martabat dan kehormatannya. Mengenai konsep "hukuman peringatan", Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya menjelaskan bahwa ini merupakan bentuk hukuman yang ringan dan tidak membatasi kebebasan hak anak. Hukuman peringatan ini bertujuan untuk memeberikan peringan kepada anak-anak agar tidak terlibat dalam perilaku kriminal yang mungkin telah mereka lakukan atau yang berisiko mereka lakukan, tanpa perlu membawa masalah tersebut ke pengadilan. Di sisi lain, "hukuman bersyarat" dapat diberlakukan oleh hakim dalam kasus-kasus di mana hukuman penjara maksimum adalah dua tahun. Jika hakim memutuskan bahwa anak harus direhabilitasi di luar lembaga, keputusan tersebut akan menentukan lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan dan rehabilitasi mereka.

Sebagaimana dikemukakan oleh Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, "hukuman bersyarat" mencakup syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi anak selama menjalani masa hukumannya. Syarat-syarat ini terbagi menjadi kategori umum dan khusus.[[39]](#footnote-39) Syarat umum mengamanatkan agar anak tidak melakukan tindak pidana lagi selama masa hukuman bersyarat. Sebaliknya, syarat khusus melibatkan tindakan atau larangan yang ditetapkan dalam putusan hakim, yang memastikan bahwa kebebasan anak tetap diperhatikan. Di sisi lain, "hukuman pemasyarakatan di luar lembaga pemasyarakatan" dirinci dalam Pasal 75 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal ini menguraikan berbagai jenis hukuman pemasyarakatan yang dapat dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan anak. Bentuk-bentuk yang mungkin termasuk: 1. Terlibat dalam program bimbingan dan konseling yang diawasi oleh petugas pemasyarakatan; 2. Mengikuti terapi di fasilitas kesehatan mental; atau 3. Menjalani perawatan untuk penyalahgunaan zat yang melibatkan alkohol, narkoba, zat psikotropika, dan bahan adiktif lainnya

Dalam pasal 2 dan pasal 5 undang-undang sistem peradilan pidana anak, ketentuan pidana dan tindakan mencakup beberpa pasal dari undang-undang tersebut. Dalam ketentuan ini, sistem pidana anak akan mengacu pada keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyilidikan hingga tahap pembimbingan pengaturannya. Dalam hal ini, sanksi berarti konsekuensi hukum bagi orang yang melanggar undang-undang atau memaksa dilaksanakannya undang-undang.[[40]](#footnote-40)

1. **Tinjauan Umum Tentang Anak**
2. Pengertian Anak

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki martabat sebagai manusia seutuhnya. Mereka merupakan sumber potensi dan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa di masa depan. Oleh karena itu, kita harus melindungi anak-anak kita dari tindakan buruk dan mencegah mereka menjadi korban dari tindakan buruk. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam salah satu dari sekian banyak definisi anak di KUHP , istilah ‘anak’ tidak didefinsikan secara eksplisit, tetapi hanya mengacu pada seseorang yang belum mencapai usia tertentu. Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa dalam kasus penuntutan pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak kejahatan sebelum mencapai usia 16 tahun, hakim memiliki wewenang untuk memutuskan agar pelaku dikembalikan kepada orang tua atau wali mereka tanpa dikenakan hukuman, atau menyerahkan pelaku kepada pemerintah tanpa hukuaman apapun, jika perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan atau salah satu pelanggaran sesuai dengan ketentuan pasal 489, 490, 492, 497, 503, 305, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan telah dihukum karena kejahatan selama kurang dari dua tahun, atau terkait dengan salah satu pelanggaran yang disebutkan sebelumnya, dan dimana putusannya telah berkekuatan hukum tetap, akan menjalani hukuman yang sesuai.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, yang lebih dikenal sebagai KUHP, terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai anak, yang dijabarkan dalam Pasal 40 KUHP. Pasal ini menetapkan batas usia minimum untuk pertanggungjawaban pidana bagi ana yang terlibat dalam tindak pidana. Penetapan batas usia 12 tahun didasari oleh pertimbangan psikologis, termasuk kematangan emosional, intelektual, dan mental anak. Dengan demikian, anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak dapat diadili secara pidana, dan penanganan kasus mereka akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan khusus anak.

Anak dalam undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 anak yang sudah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun dapat dimintai peratanggungjawaban. Terjadi gap antara ketentuan KUHP dan UU SPPA dimana KUHP tidak mengatur tindakan bagi anak yang telah berusia 12 tahun namun belum berusia 14 tahun. KUHP membuka peluang bahwa anak pada usia tersebut dapat dikenai pidana pokok seperti pemenjaraan, berbeda dengan UU SPPA yang mengisyaratkan bahwa pemenjaraan hanya diperbolehkan bagi anak yang sudah berusia diatas 14 tahun.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tentang tata cara penanganan anak yang belum berusia 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini,keputusan ditetapkan oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, yang memiliki dua opsi:

a. mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau wali;atau

b. mendorong anak untuk mengikuti program pendidikan, pembinaan, dan pendampingan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau lemmbaga kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan durasi maksimal enam bulan.

KUHP baru juga menerangkan mengenai kepentingan terbaik bagi anak yang diatur dalam pasal 112,113,114,115,116,117. merupakan konsep yang sesungguhnya tepat dalam hal tujuan kepentingan anak, namun menjadi catatan penting karena pembuat undang-undang tetap menyebutkan pertimbangan sesuai dengan tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 KUHP dan Pasal 52 KUHP. Hal yang harus disoroti bahwa ketentuan pasal 51 dan 52 KUHP merupakan konsep tujuan dan pemidanaan yang bersifat umum, dalam hal ini juga mencakup pada pemidanaan orang dewasa. Sedikit terkait Pasal 51 dan 52 KUHP, dalam kedua pasal tersebut, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa dalam pemidanaan bertujuan salah satunya menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan sosial, dan mewujudkan perdamaian. Selanjutnya mengatur pula bahwa pemidanaan wajib mempertimbangkan salah satunya dampak tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan pemaafan dari korban dan/atau keluarganya.

1. Anak Menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) terdiri dari kata Konvensi dan Hak Anak.[[41]](#footnote-41) Konvensi atau konvenan adalah perjanjian antar negara, penguasa pemerintahan, dan lainnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). konvensi merupakan suatu hukum internasional atau instrumen internasional karena perjanjian tersebut mengikat secara yuridis dan politis. KHA adalah perjanjian internasional yang mengikat tentanng hak anak.

Kerangka kerja awal untuk mengatasi keterlibatan anak-anak dalam kegiatan kriminal diuraikan dalam bagian dua peraturan beijing, yang merupakan bagian dari aturan minimum standar perserikatan bangsa-bangsa untuk administrasi peradilan anak. Peraturan ini menekankan bahwa setiap negara pihak harus mengintegrasikan peradilan anak ke dalam strategi pembangunan nasionalnya. Hal ini menyiratkan bahwa peradilan anak harus dianggap sebagai sistem pengadilan publik yang tanggung jawab untuk mengadili kasus-kasus yang melibatkan anak, ssekaligus mempertimmbangkan hak dan tanggung jawab individu sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, undang -Undang Perlindungan anak (KHA) membahas berbagai aspek mengenai anak di bawah umur yang bertentangan dengan hukum. Pasal 37 KHA mengamatkan perlindungan tertentu untuk anak-anak, termasuk larangan menjatuhkan hukuman mati bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun yang telah melakukan pelanggaran. Ini menetapkan bahwa pemenjaraan dan kurungan lain harus digunakan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk waktu sesingkat yang diperlukan. Dalam kasus di mana seorang anak harus dirampas kebebasannya karena masalah hukum, sangat penting bagi mereka untuk ditempatkan di lingkungan yang terpisah dari orang dewasa.[[42]](#footnote-42)

Hak-hak anak yang terdapat pada KHA bisa dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu :[[43]](#footnote-43)

1. Hak untuk kelangsungan hidup
2. Hak untuk tumbuh kembang
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan
4. Hak untuk berpartisipasi.

Mukadimah Deklarasi Hak Anak-Anak mencantumkan 10 prinsip

yang berkaitan dengan hak anak yaitu: [[44]](#footnote-44)

1. Anak-anak memiliki hak atas semua hak yang tercantum didalam deklarasi ini. Tanpa memandang perbedaan dalam bentuk apapun, setiap anak berhak atas hak-hak ini tanpa diskriminasi terkait ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau pandangan lainnya, asal usul, maupun status sosial, baik kaya maupun miskin, serta keturunan atau status keluarga.
2. Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dan memiliki akses terhadap kesempatan serta fasilitas yang dijamin oleh hukum dan berrbagai sarana. Hal ini penting agar mereka dapat tumbuuh dan berkembang secara fisik, mental, moral, dan sosial dengan sehat dan alami dalam lingkungan yang bebas dan bermartabat.
3. Sejak lahir, setiap anak harus diberikan nama dan kewarganegaraan.
4. Anak-anak berhak atas pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Untuk mencapai tujuan ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Mereka memiliki hak atas nutrisi yang baik, tempat tinggal yang layak, fasilitas rekreasi, dan perawatan kesehatan yang memadai.
5. Anak- anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat tertentu pendidikan, harus perlakuan khusus. [[45]](#footnote-45)
6. Supaya suatu keadaan memperoleh perawatan dan kepribadian anak-anak secara optimal dan harmonis, mereka memerlukan cinta dan pengertian yang mendalam. Sebisa mungkin, anak-anak sebaiknya dibesarkan di bawah pengasuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, serta ditempatkakn dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan sehat secara fisik dan mental. Anak-anak yang berusia di bawah lima tahun seharusnya tidak dipisahkan dari ibunya. Masyarakat dan pihak berwenang memiliki tanggung jawab untuk memeberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki kelluarga serta kepada mereka yang kurang mampu. Pemerintah atau lembaga terkait diharapkan dapat memberikan dukungan keuangan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Untuk memastikan kepribadian mereka berkembang dengan seluruh potensi dan keharmonisan yang dimiliki, anak-anak memerlukan cinta serta pengertian. Sebisa mungkin, mereka seharusnya dibesarkan di bawah pengasuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan dalam kondisi yang penuh kasih, sehat secara fisik dan mental. Anak- anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak miliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau fihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan. [[46]](#footnote-46)
9. Anak-anak perlu dilindungi dari segala bentuk pelecehan, kekejaman dan penindasan.mereka tidak boleh diperdagangkan dalam bentuk apapun. Menggunakan tenaga kerja anak-anak di bawah umur dilarang keras, tanpa kecuali. Anak-anak tidak seharusnya terlibat dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, serta yang dapat menganggu perkembangan fisik, mental, atau moral mereka.
10. Selain itu, anak-anak juga harus dilindungi dari tindakan yang dapat menimbulkan diskriminasi dalam bentuk apapun. Mereka harus dibesarkan dalam suasana pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan universal. Selain itu, mereka harus diajarkan untuk menyadari bahwa energi dan bakat mereka seharusnya didedikasikan untuk kebaikan sesama manusia.
11. Definisi anak menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan dilindungi oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Seperti yang didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indoneisa (KBBI) anak-anak dianggap sebagai generasi keddua. Lebih lanjut, undang-undang No. 23 Tahun 2002, yang membahas Perlindungan Anak, mengakui bahwa anak-anak adalah karunia berharga dari Tuhan, memiliki martabat dan nilai sebagai manusia yang lengkap.[[47]](#footnote-47) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Meskipun demikian, penerapan hukuman ini masih belu efektif dalam memberikan efek jera dan belum sepenuhnya mampu mencegah kejahatan terhadap anak secara menyeluruh[[48]](#footnote-48). Mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana mencegahnya adalah pertanyaan yang akan terus diperdebatkan selamanya. Tindak pidana merupakan permasalahan manusia, yang terjadi tanpa disadari oleh pelakunya dan berkaitan dengan dorongan untuk bertindak berdasarkan keinginan, sehingga dapat menimbulkan pelanggaran seperti pemerkosaan yang pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban[[49]](#footnote-49). Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa hawa nafsunya terpuaskan.

1. Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Anak dalam konteks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang terlibat dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
2. Anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut anak adalah individu yang berusia 12 (dua belas) tahun, namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga telah melakukan tindak pidana
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang disebut juga anak sebagai korban adalah anak di bawah 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak di bawah 18 (delapan belas) tahun yang mampu memeberikan keterangan yang diperlukan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri[[50]](#footnote-50).

Dalam merumuskan pengertian “anak” menurut UU No.11 Tahun 2012 [[51]](#footnote-51), tidak dipertimbangkan apakah anak tersebut telah menikah atau belum, termasuk juga status pernikahannya yang pernah ada. Oleh karena itu, meskipun seorang anak telah menikah sebelum mencapai usia 12 (dua belas) tahun dan mungkin bahkan telah memiliki keturunan, anak tersebut tetap tidak dianggap sebagai “anak” dalam konteks UU No.11 Tahun 2012 SPPA

1. **Sistem Peradilan Pidana Anak**
2. Pengertian SPPA

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem peradilan pidana yang secara khusus mengenai anak-anak. Untuk memahami hal ini, pertama-tama kita harus memahami pentingnya Sistem Peradilan Pidana. Istilah Sistem Peradilan Pidana sendiri berarti “suatu mekanisme kerja dalam pencegahan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem dasar”. Sistem Peradilan Pidana merujuk pada “mekanisme yang bekerja dalam pencegahan kejahatan dengan pendekatan sistematis”. Sistem ini addalah sistem hukum yang berfokus pada hukum pidana, mencakup hukum material, hukum formal, dan hukum penegak hukum. Penjelasan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur penanganan kasus anak yang terlibat dalam tindakan melawan hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga bimbingan pasca-hukuman.[[52]](#footnote-52)

Terdapat dua kategori perilaku anak yang membuat mereka bertentangan dengan hukum, yaitu:[[53]](#footnote-53)

1. *Status Offender* : perilaku kenakalan anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai suatu kejahatan, seperti ketidakpatuhan,membolos sekolah, atau kabur dari rumah
2. *Juvenile deliquency* : perilaku kenakalan anak yang bila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Dengan mempertimbangkan uraian yuridis di atas, bisa dikatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak” adalah sistem peradilan pidana yang secara khusus menangani kasus “Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)”, yang terdiri dari:

1. anak yang berkonflik dengan hukum,
2. anak yang menjadi korban tindak pidana, dan
3. anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Hal ini terlihat dari banyaknya instansi yang terlibat. mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Semua lembaga ini berrperan penting dalam mengelola proses yang dimulai sejak anak berhubungan dengan sistem peradilan pada tahap penyidikan. Mereka bertanggung jawab untuk memutuskan apakah anak terrsebut akan diebaskan atau akan diproses lebih lanjut di pengadalin anak. Dalam konteks ini, anak terlibat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Keadilan Restoratif.[[54]](#footnote-54)

1. Tujuan SPPPA

Peradilan anak melakukan tugas yanng hampir sama dengan peradilan lainnya di indonesia. Dengan kata lain, dia menerima permintaan, memeriksanya, mengadilinya, dan akhirnya menyelesaikannya. Peradilan anak adalah satu-satunya tempat dimana kasus yang ditangani fokus pada masalah anak. Diberikan perawatan khusus karena yang ditangani adalah anak. Hal ini dilakukan untuk memastikan pertumbuhan fisisk dan memntal anak-anak sebagai generasi yang diperhatikan di masa depan.

Oleh karena itu, pengadilan anak perlu memastikan adanya perlindungan, pelatihan,dan pendidikan kepada anak-anak. Dari sudut pandang psikologis, elemen perlindungan anak dalam peradilan pidana anak bertujuan untuk mencegah anak-anak dari penentaraan,kekerasan, tekanan, perlakuan asusila, dan kekhawatiran. Untuk mewujudkannya, undang – undang yang berfungsi sebagai landasan, dasar, dan metode untuk mencapai kesejahteraan dan kepastian hukum di indonesia. Undang-undang perlindungan anak didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis, sosiologis, dan yuridis[[55]](#footnote-55). Aspek filosofisnya mencerminkan alasan yang menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat memperhatikan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum, yang semuanya tertuang dalam suasana kebatinan serta falsafah negara Indonesia yang bersumber dari Pancasila serta Undang – Undang Dasar 1945. Landasan filosofis penyususnan undang-undang perlindungan anak tercantum pada huruf a, yaitu menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadpa hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Tujuan perlindungan itu adalah untuk memajukan kepentingan umum, khususnya kesejahteraan anak.

Dalam situasi ini, jelas bahwa Lembaga Peradilan memiliki tugas utama untuk menjaga kesejahteraan anak dan menegakkan keadilan bagi anak. Lembaga peradilan tidak hanya berkonsentrasi pada penindakan pidana tetapi juga harus lebih konsentrasi pada perlindungan masa depan anak. Kesejahteraan anak adalah aspek filosofis dari sistem peradilan pidana anak. Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak dan kesejahteraan anak yang diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.[[56]](#footnote-56) Yang perlu diperhatikan, bahwa kesejahteraaan anak sangatlah penting. Ini disebabkan bahwa:

1. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa anak memiliki potensi besar yang dibangun atas dasar warisan dari generasi sebelumnya.
2. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab, maka anak harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh kembang secara wajar.
3. Di dalam masyarakat masih dijumpai anak-anak yang menghadapi berbagai hambatan dalam kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonominya.
4. Anak belum mampu mengurus dirinya sendiri.

Tujuan utama SPPA adalah meningkatkan kesejahteraan anak, dan tujuan kedua adalah menekankan prinsip proporsionalitas. “Memperjuangkan kesejahteraan anak” harus berarti bahwa Peradilan Anak harus berusaha menghindari hukuman yang hanya sekedar menghukum, sementara tekanan prinsip proposionalitas harus berarti bahwa Peradilan Anak tidak hanya harus berlandaskan pada pertimbangan keputusan juri, tetapi juga harus berupaya untuk menghindari hukuman yang tidak sebanding.

Singkatnya, hukuman pidana anak berusaha memberikan yang terbaik bagi anak sambil mempertahankan wibawa hukum dan kepentingan masyarakat. Sebagai generasi berikutnya, anak-anak akan melanjutkan perjuangan bangsa dan sumber daya manusia untuk pembangunan negara. Untuk menjaga kesejahteraan anak, anak harus diadili di pengadilan tersendiri. Peningkatan pembangunan untuk seluruh masyarakat termasuk mempertahankan kesejahteraan anak. Mendidik anak adalah bagian dari menegakkan keadilan bagi anak.

1. Asas Dan Prinsip SPPA

Sesuai dengan asas-asas umum perlindungan anak yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak, negara menerapkan asas-asas tersebut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 2 beserta penjelasannya, dijelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak didasarkan pada beberapa asas-asas, yaitu: [[57]](#footnote-57)

* 1. Asas perlindungan, Prinsip perlindungan yang mencakup upaya langsung dan tidak langsung dari perbuatan yang merugikan anak secara fisik dan/atau psikis. [[58]](#footnote-58)
  2. Asas keadilan, setiap kasus anak harus ditangani secara berbeda, dengan tetap mencerminkan rasa keadilan yang mendalam bagi mereka.
  3. Non diskriminasi, menjamin tidak adanya perlakuan berrbeda terhadap anak berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, suku, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
  4. Asas kepentingan terbaik, penanganan yang selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. [[59]](#footnote-59)
  5. Asas penghargaan terhadap pendapat ana menekankan pentingnya mengakui hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan padangannya dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam hal-hal yang berdampak pada kehidupan mereka.
  6. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak merupakan hak asasi manusia yang paling fundamental, yang wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
  7. Asas pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas anak melalui pengabdian Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, sikap dan perilaku, keterampilan, pelatihan profesional, dan kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
  8. Asas proporsional menekankan bahwa setiap perlakuan terhadap anak harus mempertimbangkan kebutuhan, usia, serta kondisi mereka.
  9. Asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir menggarisbawahi bahwa pada dasarnya, anak-anak tidak seharusnya dirampas kebebasannya, kecuali dalam situasi dimana hal tersebut diperlukan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi.
  10. Asas penghindaran pembalasan, yaitu prinsip menghindari tindakan balasan dalam proses peradilan pidana.

Sementara itu, Asas-asas Peradilan Anak yang disampaikan oleh oleh Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya mencakup hal-hal berikut: [[60]](#footnote-60)

* 1. Batasan usia.
  2. Pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan.
  3. Pengadilan anak mengharuskan adanya pemabgian kasus yang jelas.
  4. Bersidang dengan hakim tunggal dan hakim anak ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
  5. Sanksi yang dijatuhkan kepada anak cenderung lebih ringan dibandingkan dengan hukuman untuk orang dewasa.
  6. Kasus-kasus tersebut ditangani pejabat khusus.
  7. Diperlukan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh serta diakuinya Pembimbing Masyarakat.
  8. Adanya kehadiran penasehat hukum.
  9. Masa penahanaan bagi anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa.

Dalam Konvensi Hak Anak, terdapat empat prinsip umum yang menjadi dasar perlindungan anak yang harus diperhatikan oleh setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, yaitu:[[61]](#footnote-61)

1. Prinsip non-diskriminasi menegaskan bahwa semua hak yang diakui dalam Konvensi Hak Anak berlaku untuk setiap anak tanpa pengecualian. Pasal 2 ayat (1) mencantumkan bahwa negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi ini wajib menghormati dan menjamin hak-hak yang telah ditetapkan, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, bagi setiap anak di bawah yurisdiksinya. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) menjelaskan komitmen negara pihak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi anak-anak dari segala bentuk diskriminasi.
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi Anak diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang menegaskan bahwa dalam setiap tindakan dan perlakuan yang berkaitan dengan anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritasutama. Prinsip ini menekankan bahwa semua keputusan administrasi terkait perlindungan anak harus mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak, tanpa mengacu pada “standar orang dewasa”. [[62]](#footnote-62)
3. Prinsip hak hidup, bertahan hidup dan berkembang tercermin dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa “negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat untuk hidup”. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) menegaskan komitmen negara pihak untuk mengupayakan semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan perkambangan anak. Dari sini, dapat dimaknai bahwa untuk “menjamin hak untuk hidup anak”, negara harus menciptakan lingkungan yang kondusif, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta memberikan akses bagi setiap anak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat Anak [[63]](#footnote-63) juga dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1), yang menyatakan bahwa negara pihak akan memastikan bahwa anak-anak yang memiliki pandangan sendiri berhak untuk mengungkapkan pendapat mereka secara bebas mengenai segala hal yang mempengaruhi mereka, dan pendapat tersebut akan dihargai sesuai dengan usia dan kematangan anak. Ketentuan ini menegaskan pentingnya menghormati pandangan anak dan memperhatikan suara mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka tidak hanya dapat dipandang sebagai individu yang lemah dan pasif, tetapi juga sebagai individu otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang mungkin berbeda dari orang dewasa.

4. Karakteristik SPPA

Nikmah Rosidah menguraikan ciri-ciri Sistem Peradilan Pidana Anak dengan jelas sebagai berikut:

* 1. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas beberapa jenis komponen atau subsistem yang saling terkait, yaitu[[64]](#footnote-64):
  2. Penyidikan, yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  3. Penuntutan pidana, yang dilaksanakan oleh penuntut umum yaitu kejaksaan, berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
  4. Proses pemeriksaan di pengadilan, yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi untuk banding, mengikuti pedoman dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
  5. Perwakilan masyarakat, yang mencakup dari penyuluh masyarakat, pekerja sosial profesional, dan pekerja kesejahteraan sosial, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  6. Komponen atau subsistem dalam sistem peradilan pidana anak saling berinteraksi dan saling bergantung untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Peradilan Anak, yang ditetapkan dalam Bab III Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  7. Sistem peradilan anak tidak hanya merupakan penjumlahan dari berbagai komponen yang ada. Dalam konteks ini, yang lebih penting dari pada sekadar kuantitas komponen adalah kualitas dari setiap elemen dalam sistem peradilan anak itu sendiri.[[65]](#footnote-65)

1. Surbakti,M.,&Zulyadi,R.,Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Medan: *Jurnal Pendidikan, Humaniora Dan Ilmu Sosial (Jehss)*,2019,Hlm.144. [↑](#footnote-ref-1)
2. Iftitah, A, Et Al.,Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak, Makassar: *Birokrasi Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2023,Hlm. 152-167. [↑](#footnote-ref-2)
3. Surbakti,M.,&Zulyadi,R.,Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasa*n*, Medan: *Jurnal Pendidikan, Humaniora Dan Ilmu Sosial (Jehss),*2019,Hlm.145. [↑](#footnote-ref-3)
4. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang N0 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20. [↑](#footnote-ref-4)
5. Karim,I.,Nawi,S.,&Kamal,M. Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Anak Berdasarkan System Peradilam Pidana Anak. *Journal Of Lex Philosophy. (Jlp).* 2024. Vol*5(2),*Hlm.698. [↑](#footnote-ref-5)
6. Mubarok Nafi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Mojokerta: *Insight Mediatama*, 2022,Hlm.17-18. [↑](#footnote-ref-6)
7. Rosidah Nikmah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, 2019. Hlm 157 [↑](#footnote-ref-7)
8. Lestari,S.I.,Et Al., Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Polewali, Polewali: *Journal Of Lex Generalis (Jlg)*, 2023,*4*(1), Hlm.99. [↑](#footnote-ref-8)
9. Yunita Dwi Anggriani,”*Analisis Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak”.* Skripsi Sarjana Hukum, Tegal: Fakultas Hukum Unversitas Pancasakti Tegal, 2022. [↑](#footnote-ref-9)
10. Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*,Tangerang: Perpustakaan Nasional; Katalog Dalam Terbitan (Kdt), Hlm. 139 [↑](#footnote-ref-10)
11. Tina Asmarawati. Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.Yogyakarta : Deepublish. 2015.Hlm. 108 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*, Hlm.35 [↑](#footnote-ref-12)
13. Djoko Sumaryanto. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative Publishing 2021.Hlm.65 [↑](#footnote-ref-13)
14. Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana*.Yogyakarta : Deepublish.2020. Hlm 5 [↑](#footnote-ref-14)
15. Melati, D. P. Efektifitas Penjara Pidana Pidana Pengguna Narkotika Untuk Anak. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 2016.*1*(2), Hlm. 96 [↑](#footnote-ref-15)
16. Ari Sudewo, F. (2022). PENOLOGI DAN TEORI PEMIDANAAN. Hlm. 23. 2022 [↑](#footnote-ref-16)
17. Nasution, Et Al. Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia: Kajian Literatur Atas Kuhp Baru. *Judge: Jurnal Hukum*, (2024)*5*(01), Hlm. 19 ([Https://Www.Journal.Cattleyadf.Org/Index.Php/Judge/Article/View/507](https://www.journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/507)) [↑](#footnote-ref-17)
18. Hamzah. Pemikiran Hukum Dan Pranata Sosial. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2020. *9*(1).( [Https://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Maqasid/Article/View/10281](https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/10281)) [↑](#footnote-ref-18)
19. Widjaja, J. Konsep Sanksi Pidana Yang Memberikan Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan. *Jurnal Yustitia*, 2021, *22*(1). [↑](#footnote-ref-19)
20. Nasution, Et Al. Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia: Kajian Literatur Atas Kuhp Baru. *Judge: Jurnal Hukum*, (2024)*5*(01), Hlm.19 ([Https://Www.Journal.Cattleyadf.Org/Index.Php/Judge/Article/View/507](https://www.journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/507)) [↑](#footnote-ref-20)
21. Rivanie, Et Al. Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 2022, *6*(2), 179-181. ([Https://Holrev.Uho.Ac.Id](https://holrev.uho.ac.id)) [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid,*Hlm.180. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid*,Hlm. 181 [↑](#footnote-ref-23)
24. H. Flora. Restorative Justice In The New Criminal Code In Indonesia: A Prophetic Legal Study, 2022, Hlm.10 Doi: [Https://Doi.Org/10.21070/](https://doi.org/10.21070/) [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid*, Hlm.11 [↑](#footnote-ref-25)
26. Setiawan, B.Hakim Dalam Telaah Sistem Hukum Dan Konsep Profetik. *Sinergitas Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Excell. Court*, 2017, Hlm. 182. ([Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Budaya](http://id.wikipedia.org/wiki/budaya),) [↑](#footnote-ref-26)
27. *Op.Cit.* Flora,Hlm.11 [↑](#footnote-ref-27)
28. Yasir Said, Irfani. *Sanksi Pidana Kehutanan Serta Pemabahasan Lainnya*. Nusamedia. 2022 Hlm. 3 [↑](#footnote-ref-28)
29. Tim Hukum Online, *Macam-Macam Sanksi Pidana Dalam Kuhp Baru* .2023([Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Sanksi-Pidana-Kuhp-Baru-Lt64587e6795ac0/?Page=2](https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-baru-lt64587e6795ac0/?page=2)) Diakses Tanggal 8 Desember 2024 Pukul 20:25 [↑](#footnote-ref-29)
30. Tim Hukum Online, *Macam-Macam Sanksi Pidana Dalam Kuhp Baru*. 2023 ([Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Sanksi-Pidana-Kuhp-Baru-Lt64587e6795ac0/?Page=2](https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-baru-lt64587e6795ac0/?page=2)) Diakses Tanggal 8 Desember 2024 Pukul 20:25 [↑](#footnote-ref-30)
31. Erwin Susilo. Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak ( Pertentangan Antarnorma Dan Relevansinya Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia. Yogyakarta : Lautan Pustaka. 2023 Hlm.31 [↑](#footnote-ref-31)
32. Tim Hukum Online, *Macam-Macam Sanksi Pidana Dalam Kuhp Baru*. 2023 ([Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Sanksi-Pidana-Kuhp-Baru-Lt64587e6795ac0/?Page=2](https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-baru-lt64587e6795ac0/?page=2)) Diakses Tanggal 8 Desember 2024 Pukul 20:25 [↑](#footnote-ref-32)
33. Teguh Prasetya. *Seri Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana Perkembangan Pemikiran Teori-Teori Pemidanaan Dan Dasar Penentuan Sanksi Pidana*. Jakarta : Nusamedia. 2022. Hlm.14-15 [↑](#footnote-ref-33)
34. Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, Hlm. 141 [↑](#footnote-ref-34)
35. Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, Hlm. 141 [↑](#footnote-ref-35)
36. Nafi Mubarok, *Op.Cit*, Hlm 112 [↑](#footnote-ref-36)
37. Ade Adhari. *Pembaharuan Sistem Pelaksaan Pidan*a. Yogyakarta : Deepublish. 2020 Hlm. 179-180 [↑](#footnote-ref-37)
38. Angger Sigit Pramukti, S. H., & Fuady Primaharsya, S. H. . *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mediapressindo. 2018. Hlm 87 ([Https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=Id&Lr=&Id=J7qkeaaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pr5&Dq=++Angger+Sigit+Pramukti,+S.+H.,+%26+Fuady+Primaharsya,+S.+H.+.+Sistem+Peradilan+Pidana+Anak.+Mediapressindo.+2018.+Hlm+87&Ots=2dby1kyze8&Sig=9etg4w3xicutmx4naiv3g\_Dwli0&Redir\_Esc=Y#V=Onepage&Q&F=False](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=J7QkEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=++Angger+Sigit+Pramukti,+S.+H.,+%26+Fuady+Primaharsya,+S.+H.+.+Sistem+Peradilan+Pidana+Anak.+MediaPressindo.+2018.+Hlm+87&ots=2DbY1KYZE8&sig=9Etg4w3xICUtmx4NAIV3g_dwlI0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)) [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ibid.* Hlm 88 [↑](#footnote-ref-39)
40. Santosa Et Al Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kepolisian Resor Wajo) Makassar Innovative*: Journal Of Social Science Research , 2023,*Vol.3 No.4 Hlm. 2037. ([Https://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative/Article/View/3697/2666](https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3697/2666)) [↑](#footnote-ref-40)
41. Pungkas, D., Junaidi, A., & Faried, F. S. Analisis Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Yang Ada Di Indonesia. *Jurnal Bevinding*, 2024 *1*(11), 66-73. [↑](#footnote-ref-41)
42. Aryani, F. D., Candra, D. K., Idayanti, S., & Hamzani, A. I. PROTECTION OF CHILDREN AS WITNESS AND VICTIMS OF CRIMINAL ACTIONS IN LEGAL REGULATIONS. In *Proceeding International Conference on Social Science, Humanities, Education and Society Development (ICONS)* (Vol. 1, pp. 77-88).2023. Universitas Pancasakti Tegal. [↑](#footnote-ref-42)
43. Faisal Riza& Fauzi Anshari, *Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Ana*k.Medan : Umsupress 2021 Hlm.18 [↑](#footnote-ref-43)
44. Silvia Fatmah N, Konvensi Hak Anak Dam Implementasinya Di Indonesia, Bandung : Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial Vol 1 No 2 Desember 2019 Hlm 121-122 ([Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/73476/1/Fauziah Ayumi - Fsh.Pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73476/1/FAUZIAH%20AYUMI%20-%20FSH.pdf)) [↑](#footnote-ref-44)
45. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-45)
46. *Ibid*. Hlm.122 [↑](#footnote-ref-46)
47. Prameswari, B., Abdurrachman, H., & Aryani, F. D. *Penerapan Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Penerbit NEM. 2024 [↑](#footnote-ref-47)
48. Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindunga *Jurnal Dialektika Hukum*, 2020 *2*(1), 57-82. Doi : 10.36859/Jdh.V2i1.510 . [↑](#footnote-ref-48)
49. Syam, N. S.,Et Al. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Journal Of Lex Theory (Jlt)*, 2023, *4*(2), Hlm.351 [↑](#footnote-ref-49)
50. Melati, D.P., Effectiveness Criminal Punishment Prison Narcotics Users For Children ,*Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, (2016) *1*(2), Hlm.94 [↑](#footnote-ref-50)
51. R. Wiyono. Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta : Sinar Grafika. 2016,Hlm. 17 [↑](#footnote-ref-51)
52. Nikmah Rosidah, *Op.Cit*, Hlm.18 [↑](#footnote-ref-52)
53. Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia.* Jakarta : Sinar Grafika. 2022.Hlm. 105 [↑](#footnote-ref-53)
54. Rachmawati,L.D, Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, *7*(1), 2021, Hlm.121 Doi : 10.32699/Syariati.V7i1.1849 [↑](#footnote-ref-54)
55. Renhard Harve. *Penyelarasan Aturan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Deepublish. 2021 Hlm.11 [↑](#footnote-ref-55)
56. *Ibid* [↑](#footnote-ref-56)
57. Nikmah Rosidah, *Op.Cit*, Hlm. 24 [↑](#footnote-ref-57)
58. Rahmat, Ramadhani*. Hukum Acara Peradilan Anak*. Medan : Umsupres, 2021.Hlm. 28 [↑](#footnote-ref-58)
59. Ibid [↑](#footnote-ref-59)
60. Angger Sigit, *Op.Cit*, Hlm 89 [↑](#footnote-ref-60)
61. Silvia Nurusshobah, *Op.Cit*, Hlm 125 [↑](#footnote-ref-61)
62. *Op.Cit*, Silvia Nurusshobah, Hlm 126 [↑](#footnote-ref-62)
63. *Ibid*, 127 [↑](#footnote-ref-63)
64. Rosidah Nikmah, *Op.Cit*, Hlm.157 [↑](#footnote-ref-64)
65. *Ibid* [↑](#footnote-ref-65)